

Bupati Bombana Pimpin Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Dorong Transformasi Daerah dan Penguatan Industri Kreatif

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan partisipatif. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum konsultasi publik tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 75 peserta yang mewakili berbagai unsur pemerintahan daerah.

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029.

Menurutnya, RKPD tahun tersebut juga merupakan tahun kedua dari implementasi RPJMD yang mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan Hasil Produksi dan Industri Kreatif.”

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,” ujar

Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita harus mampu mencari terobosan pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta,” kata Burhanuddin.

Selain itu, Bupati Bombana juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, penguatan sektor industri kreatif dan produksi unggulan daerah harus menjadi salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Bombana ke depan.

Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si dalam laporan panitia menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku

kepentingan terhadap rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak guna menyepakati program serta kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027.

“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2027,” jelas Husrifnah.

Ia menambahkan bahwa setelah forum konsultasi publik ini, proses penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Tahapan tersebut meliputi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Bombana.

Melalui proses perencanaan yang berjenjang dan partisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dokumen RKPD yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum konsultasi publik ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Proyek Futsal Rp200 Juta di

Punggaluku Terbengkalai, IPMA Konsel Minta Audit Terbuka

Konsel, Sultranet.com - Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Selatan (IPMA Konsel) mengesampingkan keras kondisi Lapangan Futsal di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, yang dinilai terbengkalai dan diduga merupakan proyek gagal bernilai sekitar Rp200 juta dari anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Rabu (4/2/2026).

Ketua Umum IPMA Konsel, Apriansyah, mengatakan lapangan futsal tersebut kini mengalami kerusakan parah dan tidak lagi berfungsi sebagai fasilitas publik. Bangunan tanpa atap, karpet lapangan terkelupas, serta minim perawatan membuat fasilitas olahraga itu ditinggalkan masyarakat.

“Ini bukan sekadar kerusakan teknis. Ini bentuk penghinaan terhadap masyarakat Punggaluku. Anggaran digunakan, tapi hasilnya fasilitas rusak dan tidak layak. Bahkan masyarakat masih diminta membayar Rp50 ribu setiap kali menggunakan lapangan,” kata Apriansyah.

Apriansyah yang juga putra daerah Punggaluku menilai kondisi tersebut patut diduga sebagai kegagalan total pengelolaan proyek. Ia menyebut tidak masuk akal jika anggaran ratusan juta rupiah menghasilkan bangunan yang cepat rusak dan kehilangan fungsi sosialnya.

“Kalau dikelola dengan benar, tidak mungkin fasilitas publik menjadi bangunan mati seperti ini. Ini tidak bermoral dan menyakiti rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

IPMA Konsel juga menyoroti adanya pungutan sebesar Rp50.000 kepada warga yang ingin menggunakan lapangan futsal tersebut. Menurut organisasi itu, pungutan tersebut patut diduga sebagai pungutan liar karena dilakukan terhadap fasilitas publik yang rusak dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam pernyataannya, IPMA Konsel menyebut sejumlah regulasi yang diduga dilanggar, di antaranya Pasal 23 UUD 1945 tentang pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Atas kondisi tersebut, IPMA Konsel menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak Inspektorat atau BPK Kabupaten Konawe Selatan segera melakukan audit total dan terbuka terhadap anggaran pembangunan serta pengelolaan lapangan futsal Punggaluku. Selain itu, IPMA Konsel meminta seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek untuk dipanggil dan diperiksa.

Mereka juga menuntut penghentian seluruh pungutan terhadap masyarakat, meminta pertanggungjawaban administratif dan hukum bagi pihak yang terbukti lalai atau menyimpang, serta mendesak perbaikan total fasilitas atau pengembalian kerugian negara jika ditemukan penyimpangan anggaran.

Apriansyah menegaskan IPMA Konsel tidak akan tinggal diam jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.

“Punggaluku bukan tempat proyek gagal. Uang rakyat bukan untuk dihabiskan lalu dilupakan. Jika tidak ada langkah serius, kami siap membawa kasus ini ke Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan belum berhasil terkonfirmasi.

Pewarta: Ibbaa'

**Karya Bakti Terpadu Kodim
1431/Bombana, Wujud Nyata
Gotong Royong dan Kepedulian**

Lingkungan

Bombana, Sultranet.com - Semangat gotong royong tampak kuat di Alun-Alun Masjid Agung Nurul Iman Kasipute, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, saat Kodim 1431/Bombana menggelar Karya Bakti Terpadu bertema kerja bakti dan bersih-bersih lingkungan, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pasi Ter Kodim 1431/Bombana, Kapten Inf Sulistianto, dengan melibatkan Ratusan peserta yang terdiri dari personel TNI, pelajar, serta masyarakat sekitar. Sejak pagi, peserta bahu-membahu membersihkan area alun-alun demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Peserta karya bakti berasal dari berbagai unsur, yakni personel TNI dari Makodim 1431/Bombana, personel Koramil 1431-01/Rumbia, pelajar SMA Negeri 03 Bombana, pelajar SMP Negeri 02 Rumbia, serta warga di sekitar Kelurahan Kasipute yang turut ambil bagian secara aktif.

Sasaran kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah kering, pengangkutan sampah di area terbuka, hingga pembersihan selokan dan got di sekitar Alun-Alun Masjid Agung Nurul Iman. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya preventif menjaga kebersihan fasilitas umum dan mencegah timbulnya penyakit akibat lingkungan yang kotor.

Dalam arahannya, Kapten Inf Sulistianto menyampaikan apresiasi kepada para pelajar dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Ia menekankan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter disiplin dan peduli lingkungan sejak dini.

“Hari ini kita melaksanakan karya bakti pembersihan Alun-Alun Masjid Raya, mulai dari sampah kering hingga sampah yang berada di selokan dan got. Alun-alun ini adalah fasilitas umum yang wajib kita jaga kebersihannya bersama-sama,” tegas Kapten Inf Sulistiyanto.

Ia berharap melalui kegiatan ini, para pelajar dapat menjadi pelopor kebersihan dan kedisiplinan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan yang ditanamkan sejak dini akan

berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Kapten Inf Sulistianto menegaskan bahwa karya bakti ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap lingkungan sekaligus sarana memperkuat gotong royong.

“TNI hadir memberikan contoh dan keteladanan dalam membangun kebersamaan serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya generasi muda,” ujarnya.

Melalui karya bakti terpadu ini, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus terbangun rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial antara TNI, pelajar, dan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum secara berkelanjutan.

Pemkab Bombana Matangkan Persiapan Kunjungan Ketua TP PKK Sultra, Fokus pada Koordinasi dan Kelancaran Agenda

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mematangkan persiapan kunjungan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 9-10 Februari 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Rapat persiapan tersebut digelar di Ruang Rapat Bupati Bombana Lantai 2 dan dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrin, M.P.W.K., Rabu (4/2/2026).

Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana yang terdiri

dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pemerintah kecamatan, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan agenda kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara menyeluruh guna memastikan kesiapan daerah dalam menyambut kunjungan tersebut. Pembahasan mencakup kesiapan lokasi kegiatan, pengaturan penyambutan tamu, koordinasi pengamanan, hingga dukungan logistik yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrudin menegaskan bahwa koordinasi yang matang sangat diperlukan agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan agenda penting bagi daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja sama dan memastikan setiap aspek persiapan telah disiapkan dengan baik,” ujar Syahrudin dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kunjungan kerja ini sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi, baik di tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa.

Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari penyediaan fasilitas, pengaturan kegiatan lapangan, hingga pengamanan selama kegiatan berlangsung.

Rapat persiapan tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan selama kunjungan kerja berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki arti penting dalam memperkuat program pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kehadiran TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Bombana diharapkan dapat memberikan motivasi bagi kader PKK di tingkat kabupaten hingga desa untuk terus mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Beberapa agenda kegiatan yang direncanakan selama kunjungan tersebut antara lain kegiatan pemberdayaan keluarga, program ketahanan pangan rumah tangga, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dapat semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap kunjungan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut.

Rp16 Miliar untuk Jalan Vital Wawonii Tenggara, BPJN Sultra Tuai Apresiasi Warga Konkep

Sultranet, Konkep - Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk peningkatan Ruas Jalan Kekea-Batulu di Kecamatan Wawonii Tenggara,

Kabupaten Konawe Kepulauan. Peningkatan jalan nasional yang menjadi akses vital masyarakat tersebut mendapat apresiasi luas dari warga karena dinilai menjawab kebutuhan dasar konektivitas di wilayah kepulauan, Selasa (3/2/2026).

Ruas Jalan Kekea-Batulu selama ini menjadi jalur utama penghubung antar desa menuju pusat kecamatan dan fasilitas publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dan tidak merata dalam beberapa tahun terakhir kerap menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian serta perikanan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, Harsin Abd Rahim, mengatakan peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui BPJN Sultra untuk memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

“Anggaran kurang lebih Rp16 miliar dialokasikan untuk peningkatan kualitas Jalan Kekea-Batulu. Pekerjaan meliputi pengaspalan, perbaikan sistem drainase, serta penguatan struktur jalan agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dan beban kendaraan,” kata Harsin saat ditemui belum lama ini.

Ia menjelaskan, proses pengerjaan jalan dimulai pada awal 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dan kontrak pekerjaan diselesaikan pada 2025. Pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas warga akan meningkat, biaya transportasi bisa ditekan, dan akses layanan publik menjadi lebih cepat dan aman,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari masyarakat setempat. Tokoh pemuda Wawonii Tenggara, Irfan, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

“Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi kami. Jalan ini sudah lama rusak dan sering dikeluhkan warga. Sekarang kami punya harapan besar karena akhirnya diperbaiki,” kata Irfan.

Ia berharap proses pengerjaan berjalan lancar dan hasilnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih

kepada pemerintah, khususnya BPJN Sultra, yang telah memberikan perhatian nyata terhadap daerah kami," ujarnya.

Peningkatan Jalan Kekea-Batulu dinilai tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha kecil masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas menuju pusat-pusat pelayanan publik.

Pemerintah daerah berharap pembangunan jalan tersebut menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Dengan dimulainya peningkatan Jalan Kekea-Batulu, masyarakat Konawe Kepulauan optimistis konektivitas antarwilayah akan semakin baik dan mampu mendukung aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan

Masyarakat Siap Ambil Alih Jika PDAM Gagal Perbaiki Krisis Air Bersih

Sultranet.com | Bombana — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana memberikan tenggat waktu hingga Juli 2026 kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat untuk menormalkan layanan air bersih di dua desa yang mengalami krisis hampir satu tahun. Jika gagal, masyarakat menyatakan kesiapan untuk mengambil alih penanganan jaringan pipa. Rekomendasi tegas ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan PDAM di Bombana, Selasa (3/2/2026).

Rapat tersebut digelar menanggapi keluhan warga Desa Batu Lamburi dan Desa Masaloka Timur, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, yang sudah lama tidak mendapatkan aliran air perpipaan. DPRD menilai kondisi ini tidak boleh berlarut, terutama menyambut bulan Ramadan di mana kebutuhan air bersih melonjak.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, S.IP, menegaskan rekomendasi ini lahir dari keresahan publik.

“Hasil RDP tadi merekomendasikan Direktur PDAM diberi waktu sampai bulan Juli. Kalau sampai waktu itu tidak mampu menormalkan kembali layanan, maka kami siap mengambil alih. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya yang diwakili kepala desa dan camat,” kata Zalman dalam rapat.

Menurutnya, PDAM beralasan membutuhkan waktu hingga Juli untuk membahas pengajuan anggaran dengan Bupati Bombana. Namun, DPRD menilai persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat jika ada keseriusan.

“Padahal kalau Pemda serius, penyelesaiannya cepat. Anggarannya tidak besar, hanya sekitar Rp100 juta,” ujarnya.

Zalman menekankan bahwa DPRD berpihak pada masyarakat yang menanggung beban ekonomi. Warga terpaksa membeli air galon dengan harga tinggi untuk kebutuhan minum dan masak.

“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Kurang lebih satu tahun air PAM tidak jalan. Akibatnya warga harus merogoh kocek cukup besar untuk beli air galon. Harganya bahkan dua kali lipat dibandingkan di kota, mencapai Rp8 ribu per galon,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat di kepulauan yang secara ekonomi beragam. DPRD mendesak PDAM untuk segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar janji.

“Harapan masyarakat Kepulauan Masaloka Raya jelas, persoalan ini harus cepat diatasi. Kita mau menghadapi bulan puasa, air bersih adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban kelalaian,” tegas Zalman.

DPRD Bombana memastikan akan mengawasi komitmen PDAM. Zalman menegaskan, rekomendasi ini bukan formalitas, melainkan bentuk keberpihakan legislatif terhadap hak dasar masyarakat.

“Kalau sampai Juli tidak ada progres nyata, maka skema pengambilalihan penanganan perpipaan oleh masyarakat bersama pemerintah desa akan menjadi opsi serius,” pungkasnya. (IS)

Anggota DPRD Bombana Desak Penanganan Permanen Jembatan yang Membahayakan Warga

Sultranet.com | Bombana - Seorang anggota DPRD Kabupaten Bombana mendesak otoritas terkait segera melakukan penanganan permanen terhadap jembatan penghubung dua desa yang kondisinya dinilai kian membahayakan keselamatan dan menghambat perekonomian warga, Selasa (3/2/2026).

Yudi Utama Arsyad (YUA), anggota DPRD Bombana, secara khusus meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV untuk turun tangan. Desakan itu dilayangkan karena jembatan yang menghubungkan Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang di Kecamatan Poleang Utara tersebut berada di atas Sungai Poleang yang menjadi wilayah kewenangan BWS.

“Jembatan ini sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya. Hampir setiap tahun masyarakat mengeluh karena akses mereka terhambat dan keselamatan terancam,” kata Yudi.

Ia menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Kerusakan yang terjadi menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu, biaya pengangkutan melonjak, dan menghambat aktivitas sehari-hari warga.

“Petani kesulitan membawa hasil panen, pedagang terhambat menjangkau pasar, dan masyarakat harus ekstra waspada saat melintas. Ini bukan lagi sekadar soal infrastruktur, tapi soal keselamatan dan ekonomi warga,” ujarnya.

Menurut Yudi, pemerintah desa bersama Dinas Pekerjaan Umum setempat telah beberapa kali melakukan perbaikan darurat. Namun, upaya tersebut bersifat sementara karena hanya mengganti kayu yang rusak dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar.

“Desa dan Dinas PU sudah berulang kali membantu, tapi hanya sebatas perbaikan darurat. Mereka tidak bisa membangun permanen karena jembatan ini berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.

Yudi juga menyoroti sejumlah jembatan lain di wilayah Poleang yang berada dalam pengawasan BWS Sulawesi IV, seperti jembatan penghubung Desa Teppo dan Kelurahan Bambaia, serta jembatan antara Desa Rompu-Rompu dan Desa Biru.

“Semua jembatan itu berada di atas Sungai Poleang. Artinya, tanggung jawab utama penanganannya ada pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana, Yudi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Ia mendorong adanya kebijakan khusus, bahkan Inpres, untuk mempercepat pembangunan jembatan permanen di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat hadir melalui kebijakan yang konkret. Jika perlu ada Instruksi Presiden agar persoalan ini tidak terus berlarut dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” kata Yudi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan jembatan yang layak dan aman adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Percepatan penanganan, menurutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan rasa aman warga.

“Harapan kami sederhana, jembatan ini segera dibangun secara permanen agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan ekonomi lokal kembali berjalan normal,” tutup Yudi. (IS)

IOM Sosialisasikan Migrasi Aman bagi Nelayan Bombana untuk Cegah Penyelundupan Migran

Bombana, sultranet.com - International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi tentang migrasi aman dan risiko penyelundupan migran bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai bahaya migrasi tidak teratur serta potensi keterlibatan dalam praktik penyelundupan orang yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si., di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Senin, 2 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari nelayan, nakhoda kapal, perwakilan kelompok nelayan, serta masyarakat pesisir setempat. Mereka mendapatkan pemaparan mengenai berbagai risiko hukum, sosial, dan kemanusiaan yang dapat timbul akibat migrasi tidak teratur maupun keterlibatan dalam jaringan penyelundupan migran.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilatarbelakangi oleh data dari Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Darwin, Australia. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan pelintas batas yang tertangkap karena melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Australia pada periode 1 Januari hingga 30 Oktober 2025 berasal dari Kabupaten Bombana.

“Kami menerima data dari KRI Darwin yang menunjukkan bahwa mayoritas nelayan pelintas batas yang tertangkap karena melakukan penangkapan ikan di perairan Australia berasal dari Bombana. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” kata Muhammad Siarah.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat pesisir, terutama para nelayan, agar lebih memahami aturan hukum internasional terkait wilayah penangkapan ikan serta risiko migrasi tidak teratur.

Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjutnya, menyambut baik langkah cepat IOM Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kolaborasi tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong migrasi yang aman, tertib, dan bertanggung jawab sekaligus mencegah praktik penyelundupan migran dan perdagangan orang.

“Kami mengapresiasi kerja sama IOM Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menghadirkan kegiatan sosialisasi ini. Ini merupakan langkah penting untuk memberikan pemahaman kepada nelayan agar terhindar dari praktik migrasi tidak teratur maupun penyelundupan migran,” ujarnya.

Menurut Muhammad Siarah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan informasi yang komprehensif sekaligus meningkatkan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir dalam memahami bahaya migrasi tidak teratur. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas penangkapan ikan di perairan negara lain tanpa izin.

Ia menambahkan bahwa wilayah pesisir seperti Desa Terapung memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu daerah dengan aktivitas perikanan yang cukup aktif. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi nelayan menjadi sangat penting agar mereka dapat menjalankan aktivitas melaut secara aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai berbagai modus penyelundupan migran yang sering memanfaatkan jalur laut dan melibatkan kapal-kapal nelayan. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengenali potensi risiko sejak dini dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Selain memberikan edukasi kepada nelayan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap perdagangan orang yang sering kali berawal dari praktik migrasi tidak teratur. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara dapat ditekan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan juga menyampaikan

apresiasi kepada IOM Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia atas komitmen yang terus dilakukan dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama mereka yang bekerja di sektor maritim dan perikanan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada IOM Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas berbagai upaya yang terus dilakukan dalam melindungi warga negara Indonesia di berbagai negara, terutama dalam situasi krisis,” kata Muhammad Siarah.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Menurutnya, informasi yang diperoleh para peserta diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para nelayan Bombana dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih aman dan terhindar dari berbagai praktik ilegal.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nelayan dan masyarakat pesisir Bombana dapat terhindar dari migrasi tidak teratur maupun praktik penyelundupan migran,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat pesisir semakin meningkat. Dengan demikian, nelayan Bombana tidak hanya mampu menjaga keselamatan diri saat melaut, tetapi juga turut berkontribusi dalam mencegah praktik migrasi ilegal dan penyelundupan manusia yang merugikan banyak pihak.

**Ketua TP-PKK Sultra Tinjau
Posyandu Bintang di Desa**

Terapung Bombana

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja dengan meninjau langsung pelaksanaan Posyandu Bintang di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan dasar masyarakat melalui Posyandu yang kini mengacu pada standar pelayanan terbaru, Selasa (10/2/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrin, M.P.W.K. Kehadiran rombongan disambut oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa sekaligus memastikan implementasi program Posyandu berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara ke wilayah Bombana, khususnya di Desa Terapung yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi akses wilayah.

Ia menilai kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para kader PKK dan Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran Ibu Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi penyemangat bagi kader PKK dan kader Posyandu di Bombana. Mereka selama ini bekerja dengan penuh dedikasi melayani masyarakat, bahkan di tengah keterbatasan dan akses jalan di beberapa wilayah,” ujar Fatmawati.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan konsep baru pengelolaan Posyandu yang kini

telah mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, perubahan konsep tersebut merupakan bagian dari penguatan fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa.

“Ini sudah ada aturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang mewajibkan seluruh Posyandu di Indonesia melaksanakan enam standar pelayanan minimum,” kata Arinta.

Ia menegaskan, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu yang mendukung berbagai program pembangunan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Desa Terapung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan kesehatan, pembangunan sumur bor untuk akses air bersih, serta bantuan jamban sehat guna mendukung lingkungan yang lebih higienis dan sehat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu, kader PKK, serta tenaga kesehatan di tingkat desa.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP-PKK menjadi kunci dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat berjalan optimal, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, sekaligus mempererat sinergi antara TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dukungan program yang berkelanjutan serta keterlibatan aktif kader di tingkat desa, Posyandu diharapkan mampu menjadi ruang pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar warga secara terpadu.

Pemkab Konkep Pastikan Gaji ASN dan PPPK Dibayar Tepat Waktu

LANGARA, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Pemkab Konkep), Sulawesi Tenggara, memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disalurkan tepat waktu sebagai bagian dari komitmen daerah dalam mendorong kesejahteraan sekaligus meningkatkan tanggung jawab dan kinerja aparatur. Gaji ASN dan PPPK Konkep untuk bulan Februari telah dibayarkan secara penuh per 1 Februari 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konawe Kepulauan, Mahmud, mengatakan ketepatan waktu pembayaran gaji merupakan prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pegawai serta stabilitas kerja di lingkungan birokrasi.

“Pembayaran gaji tepat waktu ini menjadi komitmen pemerintah daerah. Kami berharap ASN dan PPPK dapat bekerja lebih fokus, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Mahmud saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Minggu (01/02/2026).

Menurut Mahmud, kelancaran pembayaran gaji tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang tertib, terencana, dan akuntabel. Seluruh proses administrasi penggajian telah disiapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga penyaluran hak pegawai dapat dilakukan tanpa hambatan.

“Alhamdulillah, gaji ASN dan PPPK Konkep untuk bulan Februari sudah tersalurkan per 1 Februari. Insyaallah, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan aparatur akan terus kami jaga, karena pemenuhan hak pegawai merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur memiliki korelasi langsung dengan kualitas pelayanan publik. Dengan terpenuhinya hak-hak dasar pegawai, ASN dan

PPPK diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal dan berkontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah.

Mahmud juga berharap kebijakan pembayaran gaji tepat waktu ini mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemkab Konkep. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas aparatur, serta memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

“Kami ingin aparatur bekerja dengan tenang, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Ketika hak mereka dipenuhi tepat waktu, maka tanggung jawab terhadap tugas juga harus semakin kuat,” katanya.

Pemkab Konkep menilai konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga stabilitas fiskal agar program pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan optimal.

Kebijakan pembayaran gaji ASN dan PPPK secara tepat waktu ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja birokrasi sekaligus mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Laporan: Aldi Dermawan